

EKONOMI KELEMBAGAAN

XIII

13.1 TUJUAN PEMBELAJARAN:

Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, di wadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk berkerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan, menurut bulkis, kelembagaan berarti seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk mendapatkan tujuan hidup mereka. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa mengetahui definisi tentang ekonomi kelembagaan dan mengapa ekonomi kelembagaan ini penting di bahas.

13.2 PENDAHULUAN:

Ternyata modal kelembagaan juga menjadi penentu utama dalam perekonomian yang melebihi kepemilikan modal finansial, modal fisik, modal manusia atau modal teknologi (Cross, 2002). Ekonomi kelembagaan baru dikembangkan untuk mengatasi prediksi model neoclassic yang gagal. Ekonomi kelembagaan menekankan pada pentingnya peran institusi pemerintah dan kebijakan terhadap perekonomian. Perbedaan kualitas institusi di setiap negara menyebabkan perbedaan kinerja perekonomian antar negara. Ekonomi kelembagaan dikembangkan oleh peraih Nobel, *Douglas North*. Menurut pandangan ekonomi kelembagaan, kemakmuran suatu Negara tidak hanya dilihat dari pendekatan kuantitatif saja tetapi semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya tata perilaku, norma, adat.

Kini pembangunan ekonomi berkelanjutan, tidak lagi mementingkan korelasi keharmonisan antar aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terutama faktor lingkungan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan kini hanya memprioritaskan kemajuan, tidak lagi mempedulikan apa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Bahkan kerusakan yang disisakan oleh usaha pembangunan yang dilakukan. Menyisakan dampak buruk bagi generasi setelah kita. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh ekonomi berkelanjutan dan pembangunan yang dilakukan di Indonesia sebagai usaha memajukan perekonomian Indonesia?

Ekonomi Kelembagaan (Institutional Economics)

Sebelum membahas tentang ekonomi kelembagaan, maka perlu diketahui bahwa dalam ilmu ekonomi kelembagaan dikenal juga institusi. Ada beberapa pengertian institusi yang dikemukakan oleh para ekonom. Salah satunya pengertian yang paling banyak dipakai adalah pengertian yang dikemukakan oleh Douglas C. North. Ia mendefinisikan institusi sebagai aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan formal seperti undang-undang, konstitusi dan aturan informal seperti norma sosial, konvensi, adat istiadat.

Pada tahun 2000, Williamson telah memperkenalkan evolusi teori kelembagaan melalui empat level analisis sosial. Williamson (2000) menjelaskan level kelembagaan paling awal adalah level I, yaitu teori sosial (*social theory*) yang merupakan aturan informal yang telah melekat dalam masyarakat, seperti tradisi, agama, norma, adat, dan konvensi keterkandungan atau *mindset (embeddedness)*. Analisis level I sangat dipengaruhi oleh sejarah ekonomi dan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Pada level ini, perubahan terjadi sangat lambat, spontan, dan alamiah pada hitungan abad sampai milenium.

Menurut Williamson, level II terkait dengan lingkungan kelembagaan (*institutional environment*). Level II menekankan ekonomi kepemilikan (*economics of property rights*) yang terdiri dari aturan main (hukum), politik dan birokrasi yang meliputi fungsi eksekutif, legislatif, hukum, maupun fungsi birokrasi pemerintahan. Definisi hak milik (*property rights*) dan hukum kontrak (*contract law*) merupakan gambaran penting. Pada level ini biasanya disebut 'level aturan main hak dan kewajiban' atau 'level menuju lingkungan kelembagaan ekonomisasi order pertama'.

Level III menekankan struktur tata kelola yang menekankan kontrak dan biaya transaksi (*transaction cost economics*). Meskipun hak milik

tetap penting, fungsi sistem hukum mendefinisikan hukum kontrak dan perlindungan kontrak tidak bisa diabaikan. Pada level ini, biasanya disebut level bagaimana aturan main hak dan kewajiban dimainkan atau 'level menuju struktur tata kelola ekonomisasi order kedua'.

Level IV menekankan efisiensi sumber daya dan struktur insentif yang merupakan kerangka kerja neoklasik. Analisis marjinal dikembangkan di mana digambarkan sebagai fungsi produksi. Penyesuaian harga dan output bersifat lebih atau kurang kontinu. Pada level ini, biasanya disebut 'level menuju kondisi marjinal ekonomisasi order ketiga'.

Teori Kelembagaan baru hadir karena mampu memodifikasi, mengembangkan, dan membuka kotak hitam (*black box*) dari lemahnya aplikasi penggunaan teori Kelembagaan baru di dalam memecahkan persoalan persoalan ekonomi dalam dunia nyata. Teori Kelembagaan baru menggambarkan adanya ketidaksempurnaan informasi dan adanya biaya transaksi. Setiap pelaku ekonomi tidak dapat secara bebas keluar masuk dalam pasar karena tidak semua pelaku memiliki informasi yang sama. Informasi yang tidak sempurna menimbulkan konsekuensi biaya transaksi (*transaction cost*). Semakin informasi tidak sempurna (adanya *asymmetric information*) semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan pelaku ekonomi. Dalam pandangan Teori Kelembagaan baru, perlu adanya usaha-usaha untuk meminimalkan biaya transaksi. Ada tiga alasan yang mendasari pentingnya peran Teori Kelembagaan baru. Pertama, Teori Kelembagaan baru merupakan suatu teori yang muncul dengan kerangka Teori Kelembagaan baru, tetapi menawarkan jawaban untuk menyempurnakan dan mengembangkan teori tersebut. Kedua, Teori Kelembagaan baru penting dalam konteks kebijakan ekonomi tahun 90-an karena Teori Kelembagaan baru menentang dominasi peran pasar oleh kaum ortodoks Teori Kelembagaan baru. Ketiga, Teori Kelembagaan baru penting karena merupakan teori yang dibangun dengan menyesuaikan perubahan institusi dalam kaitannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Furubotn and Richter, 1993 dan Harris, et al.,1995).

Ekonomi kelembagaan adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan pada pentingnya aspek kelembagaan dalam menentukan bagaimana sistem ekonomi dan sosial bekerja (Black, 2002). Salah satu kunci dalam aspek ekonomi kelembagaan adalah menyangkut property right atau hak kepemilikan. Property right ini melekat dalam bentuk aturan formal dan juga norma sosial dan adat. Relevansi hak kepemilikan ini tergantung dari seberapa besar ia bisa dijalankan dan diakui dalam masyarakat. Barzel (1989) menulis dalam bukunya mengenai

Economic of Property Rights, juga oleh Cheung (1968) yang melakukan study mengenai share cropping di Taiwan. Kedua studi ini membuktikan bahwa ketidakjelasan hak pemilikan dan enforced property rights terbukti menjadi handicap dalam mentransformasi pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan lahan.

Bagian lain yang juga penting dalam konteks ekonomi kelembagaan adalah menyangkut biaya transaksi. Biaya transaksi adalah sisi lain atau pendekatan lain yang digunakan untuk menjelaskan

aspek ekonomi dari kelembagaan (Black, 2002). Biaya transaksi mempertimbangkan manfaat dalam melakukan transaksi di dalam organisasi dan antara aktor (organisasi) yang berbeda dengan menggunakan mekanisme pasar. Biaya transaksi mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam ekonomi yakni bounded rationality (rasionalitas terbatas), masalah informasi, biaya negosiasi kontrak dan opportunism. Schmid (1987) di sisi lain membedakan biaya transaksi atas tiga hal yakni 1) biaya informasi, 2) biaya kontrak, dan 3) biaya pengawasan atau penegakan hukum. Dalam konteks inilah sering terjadi pemahaman yang keliru mengenai apa yang dimaksud dengan transaction cost. Transaction cost bukanlah biaya pertukaran (cost of exchange) atau salah satu biaya dalam jual beli barang dan jasa (termasuk lahan), namun transaction cost lebih diartikan sebagai "the cost of establishing and maintaining right" (Allen, 1991). Kedua aspek di atas yakni property rights dan transaction cost adalah bagian penting yang memerlukan pemahaman yang serius dalam kelembagaan pengelolaan lahan.

Pada intinya, ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Perekonomian dikembangkan oleh individu atau kelompok yang memiliki sarana atau faktor produksi. Sehingga mereka memiliki keleluasaan atau wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Dalam hal ini pemilik faktor produksi menjadi pelaku pengembangan perekonomian. Ternyata dalam perakteknya banyak faktor-faktor yang memengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor sosial, politik dan lainnya. Pada titik ini ekonomi kelembagaan masuk untuk mewartakan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antarpelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu atau komunitas (teori modal sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), model kesepakatan yang dibikin (teori kontrak), pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain. Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar. Dalam hal ini diperlukan kelembagaan non pasar (*non-market institution*) untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung, yakni dengan jalan mendesain aturan main atau kelembagaan (*institutions*).

Ekonomi kelembagaan mempelajari dan berusaha memahami peranan kelembagaan dalam sistem dan organisasi ekonomi atau sistem terkait, yang lebih luas. Kelembagaan yang dipelajari biasanya bertumbuh spontan seiring dengan perjalanan waktu atau kelembagaan yang sengaja dibuat oleh manusia. Peranan kelembagaan bersifat penting dan strategis karena ternyata ada dan berfungsi di segala bidang kehidupan. Dengan demikian, ilmu ekonomi kelembagaan kemudian menjadi bagian dari ilmu ekonomi yang cukup penting peranannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial humaniora, ekonomi, budaya dan terutama ekonomi politik. Ilmu ekonomi kelembagaan terus berkembang semakin dalam karena ditekuni oleh banyak ahli ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya, termasuk beberapa diantaranya memenangkan hadiah nobel. Penghargaan tersebut tidak hanya tertuju langsung kepada ahli dan orangnya, tetapi juga pada bidang keilmuannya, yakni ilmu ekonomi kelembagaan (Rachbini, 2002).

Para penganut ekonomi kelembagaan percaya bahwa pendekatan multidisipliner sangat penting untuk memotret masalah-masalah ekonomi, seperti aspek sosial, hukum, politik, budaya, dan yang lain sebagai satu kesatuan analisis (Yustika, 2008: 55). Oleh karena itu, untuk mendekati gejala ekonomi maka, pendekatan ekonomi kelembagaan menggunakan metode kualitatif yang dibangun dari tiga premis penting yaitu: partikular, subyektif dan, nonprediktif.

Pertama, partikular dimaknai sebagai heterogenitas karakteristik dalam masyarakat. Artinya setiap fenomena sosial selalu spesifik merujuk pada kondisi sosial tertentu (dan tidak berlaku untuk kondisi sosial yang lain). Lewat premis partikularitas tersebut, sebetulnya penelitian kualitatif langsung berbicara dua hal: (1) keyakinan bahwa fenomena sosial tidaklah tunggal; dan (2) penelitian kualitatif secara rendah hati telah memproklamasikan keterbatasannya (Yustika, 2008: 69).

Kedua, yang dimaksud dengan subyektif disini sesungguhnya bukan berarti peneliti melakukan penelitian secara subyektif tetapi realitas atau fenomena sosial. Karena itu lebih mendekatkan diri pada situasi dan kondisi yang ada pada sumber data, dengan berusaha menempatkan diri serta berpikir dari sudut pandang "orang dalam" dalam antropologi disebut dengan emic.

Ketiga, nonprediktif ialah bahwa dalam paradigma penelitian kualitatif sama sekali tidak masuk ke wilayah prediksi kedepan, tetapi yang ditekankan disini ialah bagaimana pemaknaan, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi atas sesuatu. Jadi titik tekannya adalah menjelaskan secara utuh proses dibalik sebuah fenomena.

13.3 TEORI EKONOMI BIAYA TRANSAKSI

Ekonomi biaya transaksi sebenarnya tidak lain adalah biaya-biaya yang muncul berkenaan dengan informasi, dan agar pertukaran atau perdagangan bisa terjadi dengan biaya transaksi yang murah, masing-masing pelaku ekonomi harus mengeluarkan sumber daya dalam tiga wilayah yang tergolong kegiatan kontrak, seperti:

1. Mengukur atribut yang bisa dinilai sehingga proses pertukaran/transaksi terjadi.
2. Melindungi hak-hak terhadap barang dan jasa yang telah dipertukarkan.
3. Meregulasi dan menegakkan kesepakatan.

Akan tetapi terdapat penyimpangan. Menurut pendapat North, komunitas pedesaan di negara yang sedang berkembang biasanya memiliki biaya transaksi yang cenderung lebih rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh hubungan di dalam komunitas yang terjalin dengan erat, sehingga informasi tentang aktivitas- aktivitas di dalamnya dapat tersebar secara luas dan bebas. Besaran biaya transaksi dapat terjadi karena adanya penyimpangan dalam wujud:

1. Penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan,
2. Penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip yang beragam,
3. Penyimpangan intertemporal, dan
4. Penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan kelembagaan

A. Rasionalitas Terbatas dan Perilaku Oportunistik

Rasionalitas terbatas merujuk pada tingkat atau batas kesanggupan individu dalam menerima, menyimpan, mencari kembali, dan memproses informasi tanpa kesalahan. Konsep ini didasarkan pada dua prinsip, yaitu :

1. Individu atau kelompok memiliki batas kemampuan dalam

- memproses dan menggunakan informasi yang ada.
2. Tidak mungkin semua negara di dunia dan semua hubungan kausalitas yang relevan dapat diidentifikasi. Akibatnya, pelaku ekonomi menghadapi informasi yang tidak lengkap (*incomplete information*) dan ketidakpastian informasi (*uncertainty information*)

B. Ekonomi kelembagaan

Ekonomi Kelembagaan Lama muncul pada awal abad ke-20. Menurut Rutherford (1994) dalam Arsyad (2010), Ekonomi Kelembagaan Lama ini dibangun dan berkembang di kawasan Amerika Utara, para tokohnya antara lain: Veblen, Commons, Mitchell dan Clarence Ayres. Ekonomi Kelembagaan Lama ini muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Para tokoh Ekonomi Kelembagaan Lama mengkritik keras aliran neoklasik karena: Neoklasik mengabaikan institusi dan oleh karena itu mengabaikan relevansi dan arti penting dari kendala – kendala non anggaran (*nonbudgetary constraints*).

Sementara itu, Ekonomi Kelembagaan Baru mencoba untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya (Nabli&Nugent, 1989 dalam Arsyad, 2010). Ekonomi Kelembagaan Baru menekankan pentingnya institusi, tetapi masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik masih digunakan, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan adanya informasi sempurna (sehingga tidak ada biaya transaksi) ditentang oleh Ekonomi Kelembagaan Baru. Menurut Ekonomi Kelembagaan Baru, institusi digunakan sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar.

Ekonomi Kelembagaan Baru merupakan seperangkat teori yang dibangun di atas landasan ekonomi neoklasik, tetapi Ekonomi Kelembagaan Baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik. salah satu permasalahan tersebut adalah eksistensi sebuah perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan. Ekonomi Kelembagaan Baru merupakan sebuah paradigma baru di dalam mempelajari, memahami, mengkaji atau bahkan menelaah ilmu ekonomi.

Ekonomi Kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Perekonomian dikembangkan oleh individu atau kelompok

yang memiliki sarana atau faktor produksi. Dalam perakteknya banyak faktor-faktor yang memengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor sosial, politik dan lainnya.

Pada titik ini ekonomi kelembagaan masuk untukewartakan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh yaitu:

- a) tata letak antarpelaku ekonomi (teori ekonomi politik)
- b) desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi)
- c) norma dan keyakinan suatu individu atau komunitas (teori modal sosial)
- d) insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif)
- e) model kesepakatan yang dibikin (teori kontrak)
- f) pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik (teori hak kepemilikan) dan lain-lain.

Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar. Dalam hal ini diperlukan kelembagaan non pasar (non-market institution) untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung, yakni dengan jalan mendesain aturan main atau kelembagaan (institutions).

13.4 TOKOH-TOKOH EKONOMI KELEMBAGAAN

1. Thorstein Bunde Veblen (1857-1929)

Menurut Bunde Veblen teori ekonomi ortodoks merupakan teori teologi, oleh karena akhir cerita telah ditentukan dari awal. Ilmu ekonomi menurutnya bukan hanya mempelajari tingkat harga, alokasi sumber-sumber tetapi justru mempelajari factor-faktor yang dianggap tetap

(given). Teori ini menceritakan perilaku kelas orang-orang kaya, dimana mereka berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan sebagai motif kekuatan. Benda-benda yang dikumpulkan merupakan gambaran conspicuous consumption (konsumsi mewah), seperti mobil model mutakhir, rumah mewah, pakaian yang eksklusif dan barang-barang yang mahal lainnya yang kesemuanya sebagai cermin kemewahan dan kebanggaan sosial. Jadi menurut Veblen, kelas santai (leisure class) adalah kelasnya orang-orang yang kaya, yang menurutnya sebenarnya mempunyai kesenggangan waktu yang banyak (conspicuous leisure) suka konsumsi mewah dan boros, suka pamer, sehingga sebenarnya perilakunya dapat mubazir (conspicuous waste) dan dapat menjurus kepada keserakahan materi (pecuniary emulation).

2. Wesley Clair Mitchel (1874-1948)

Penelitian Mitchell yang tanpa terikat kepada teori-teori tertentu, dapat disimak pada tulisannya rentang siklus ekonomi (business-cycles). Menurutinya setiap siklus ekonomi sifatnya unik, maka untuk membentuk model yang sifatnya umum relatif sukar karena setiap siklus mempunyai ciri-ciri persamaan. Persamaan ciri itu timbul karena adanya kekuatan-kekuatan ekonomi yang muncul dalam berbagai tahap siklus, seperti resesi, pemulihan (recovery), masa makmur (prosperity) dan depresi.

3. Douglas C. North (1993)

North adalah merupakan tokoh ekonomi kelembagaan baru (new institutional economic) yang memperoleh nobel ekonomi pada tahun 1993, demikian juga dengan Ronald H. Coase pada tahun 1991. Nobel yang diperoleh kedua tokoh tersebut turut menjadi pemicu perkembangan keilmuan ekonomi kelembagaan baru di dunia saat ini. Pemikir ekonomi kelembagaan baru menolak sebagian asumsi ajaran ekonomi klasik/neoklasik dan menganggapnya tidak realistis seperti tidak ada biaya transaksi (zero transaction cost) dan rasionalitas instrumental (instrumental rationality). Ekonomi klasik yang mengasumsikan bahwa semua manusia adalah rasional dan bekerja berdasarkan insentif ekonomi ternyata dalam prakteknya banyak faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi individu dalam keputusan ekonominya.

4. Gunnar Karl Myrdal (1898)

Menurut Myrdal, keberadaan teori ekonomi dari kaum ortodoks tidak banyak menolong keterbelakangan negara sedang berkembang, sehingga diperlukan teori yang khas dan cocok bagi negara sedang berkembang. Myrdal berpendapat bagi negara sedang berkembang supaya bisa maju diperlukan perencanaan pembangunan, yang meliputi segala aspek yaitu aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan, maupun sektor lainnya. Alat analisis yang dapat dipergunakan dipengaruhi pemikiran Mitchell, yaitu sebab-musabab yang bersifat kumulatif. Jadi menurutnya, kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan kejiwaan dapat berhimpun menjadi sebab kejadian yang merugikan atau yang menguntungkan pembangunan.

5. Joseph A. Schumpeter (1883-1950)

Pemikiran Schumpeter bertumpu kepada ekonomi jangka panjang, yang terlihat dalam analisisnya baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru, maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus ekonomi. Keseimbangan ekonomi yang statis dan stasioner seperti konsep kaum ortodoks mengalami gangguan dengan adanya inovasi. Meskipun demikian, gangguan tersebut dalam rangka berusaha mencari keseimbangan yang baru. Inovasi bisa tidak berlanjut kalau kaum wiraswasta (kapten industri) telah terjebak dalam persoalan-persoalan yang sifatnya rutin. Meskipun Schumpeter kadang-kadang masih menggunakan beberapa asumsi ekonomi ortodoks, akan tetapi juga memasukkan aspek dinamik dengan mengkaji terjadinya fluktuasi ekonomi dimana terjadi resesi, depresi, penyembuhan (recovery) dan berada puncak (boom). Inovasi dan inovasi merupakan kreativitas dalam pembangunan, tetapi dapat terkandung sifat destruktif, seperti katanya: *Today's innovation replaces yesterday and tomorrow is itself replaced*. Jadi dengan inovasi tersebut keseimbangan yang statis terganggu, oleh karena arus uang meningkat dan tingkat harga juga meningkat.

Perbedaan Ekonomi Kelembagaan Lama Dan Baru

Old Institutional Economy (OIE)	New Institutional Economy (NIE)
Berasal dari tradisi American institutionalist dengan tokohnya T. Veblen, Wesley Mitchell, JR Commons, dan Clarence Ayres.	Mulai berkembang tahun 1930-an, melekat pada (varian) dari ekonomi klasik, dengan tokohnya adalah Adam Smith, JS Mill, Karl Marx, Marxian, mazhab Austria (Menger, von Wieser, Hayek, Schumpeter), serta neoklasik (Marshall Williamson)
Sumbernya adalah T. Veblen yang dilanjutkan C. Ayres pada kelembagaan dan teknologi, lalu JR Commons pada bidang hukum, property rights, organisasi ekonomi, transaksi ekonomi, dan distribusi pendapatan.	Disebut pula dengan istilah mathematical institutional economics, Theoretical, Institutional Economic, Modern IE, dan Neo Institutional Economic. Berangkat di luar kerangka neoklasik, untuk menjawab teka-teki di neoklasik.
Analisis terhadap individu. Analisis dilakukan secara terpisah tentang bagaimana lingkungan membentuk perilaku individu.	Objek analisis adalah organisasi. Organisasi adalah pelaku atau aktor penting, dan bagaimana setting kelembagaan mempengaruhi organisasi.

13.5 PERKEMBANGAN EKONOMI KELEMBAGAAN DI INDONESIA

Perkembangan pemikiran ekonomi di Barat turut mempengaruhi studi-studi ekonomi di Indonesia. Beberapa sarjana-sarjana Indonesia lulusan sekolah Barat yang menaruh perhatian terhadap gagasan ini dapat dilacak misalnya, Mubyarto, dengan pemikirannya tentang pengembangan ilmu dan pendidikan ekonomi alternatif yang berpijak pada sistem nilai, sosial-budaya, dan kehidupan ekonomi riil (*real-life economy*) masyarakat Indonesia. Perkembangan terkini yang perlu dicatat ialah dimasukkannya mata kuliah ekonomi kelembagaan dalam kurikulum studi pembangunan di fakultas ekonomi. Karena itu studi ekonomi kelembagaan semakin populer. Demikian juga pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kelembagaan (*institutions*) merupakan determinan utama kesejahteraan dan pertumbuhan jangka panjang. Negara-negara ataupun kawasan yang lebih makmur dewasa ini adalah yang memiliki kelembagaan politik dan ekonomi lebih baik di masa lalu (Hall & Jones, 1999; dan Acemoglu, et.al., 2001).

Kemajuan China dan India dewasa ini, dengan segala kekurangannya, bisa dijelaskan dari aspek kelembagaan ini. Juga negara-negara di Asia yang paling dinamis. Apalagi saat terjadi gelombang krisis keuangan yang menerpa dunia saat ini dimana mainstream ekonomi yang berpijak pada asumsi- asumsi ekonomi klasik membuat pendekatan ekonomi klasik semakin dipertanyakan eksistensinya, karena itu studi ekonomi kelembagaan semakin memperoleh tempat sebagai pendekatan alternatif bagi ekonomi dunia saat ini. Indonesia telah melalui banyak cerita dalam kehidupan perekonomiannya. Cerita tersebut ada yang baik dan ada pula yang tidak baik, menggembirakan dan menyedikan, mengecewakan, juga kadang memuaskan semua pihak. Namun cerita yang menghiasi dunia perekonomian Indonesia cenderung terlihat suram dan notabene menyedihkan. Entah karena kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatur perekonomian ataupun karena alasan- alasan serta faktor-faktor lain yang menyebabkan kekecewaan dan rasa ketidakpuasan dalam bangsa ini. Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan menyedihkan dalam karir perekonomiannya. Puncaknya pada krisis yang melanda negara-negara Asia yang melumpuhkan perekonomian bahkan hampir mematikan perekonomian negara-negara Asia. Indonesia salah satunya.

Setelah mengalami krisis seharusnya Indonesia banyak belajar dari apa yang telah dialaminya. Sepertinya sangat sulit untuk negara ini bagkit dan kembali menata perekonomian yang nyaris ujung tanduk. Namun Indonesia terus berusaha dan menunjukkan usaha yang keras dalam menata dan membawa perekonomian negara ini ke arah yang lebih baik. Banyak sistem-sistem baru yang diterapkan oleh Indonesia, banyak pula teori-teori barat yang diadopsi oleh Indonesia untuk diterapkan sebagai bentuk usaha membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Salah satu ilmu atau teori ekonomi yang ada di Indonesia adalah mengenai ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan membahas masalah ekonomi dalam ranah hubungan ekonomi dan kehidupan sosial serta hubungannya dengan kepemilikan seseorang atau property right. Ekonomi kelembagaan di Indonesia berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Namun pengertian pembangunan di Indonesia dewasa ini telah mengalami penyimpangan dari pengertian normatif.

13.6 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam buku Ekonomi Pembangunan dikatakan bahwa ekonomi berkelanjutan memiliki dua arti, yakni arti sempit dan arti luas. Pembangunan berkelanjutan dalam arti luas adalah pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya kapital. Sedangkan pembangunan berkelanjutan dalam arti sempit adalah pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, tetapi dengan menjaga fungsisumber daya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun, tanpa digantikan sumber daya lainnya. Melihat pengertian tersebut, maka pembangunan berkelanjutan berorientasi pada lingkungan. Dimana tidak hanya melihat pembangunannya, namun juga melihat dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Yakni tidak seharusnya mengorbankan lingkungan yang sejatinya adalah milik generasi seterusnya. Di samping itu selain faktor ataupun kondisi lingkungan, yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan dewasa ini adalah aspek sosial.

Pada awalnya lingkungan tidak dipertimbangkan dalam setiap usaha pembangunan ekonomi. Lingkungan dan sumber daya alam dianggap sebagai anugerah dari Tuhan, sehingga tercipta cukup berlimbah dan akan tercipta terus, akan selalu tersedia. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan tercipta kembali melalui proses alami, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat diperoleh dari eksploitasi dan eksplorasi. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Bahwa dengan semakin menggebu-gembunya pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, maka akan

semakin banyak sumber daya alam yang akan terpakai dan hal ini akan menyebabkan sumber daya alam yang ada akan semakin menipis. Terutama bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya perekonomian dalam berbagai sektor, terutama sektor industri. Maka dikhawatirkan, pembangunan itu sendiri akan mengalami stagnasi atau kemandegan, karena tidak ada lagi sumber daya alam yang bisa digali. Oleh karena itu diperlukan pengendalian konsumsi barang dan jasa agar tidak meningkat terlalu cepat dan yang terpenting kegiatan industri jangan sampai mencemari lingkungan, sehingga fungsi utama lingkungan menjadi terganggu.

Contoh pembangunan berkelanjutan di kota lebih ditekankan dalam segi infrastruktur atau fasilitas publik. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperlancar arus perekonomian masyarakat dan mengurangi kemacetan. Pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan oleh pemerintah kota misalnya pelebaran jalan untuk pejalan kaki dan pembangunan jalan tol. Dengan pembangunan berkelanjutan pada infrastruktur, maka masyarakat dapat tinggal di kota dengan nyaman.

13.6 INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Apakah industrialisasi akan menghambat atau mengurangi pembangunan berkelanjutan? Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pembangunan berkelanjutan berorientasi pada lingkungan, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Meskipun pembahasan bagi negara maju juga tidak bisa dihindari. Namun penekanan yang diberikan sangat berbeda. Bagi negara maju aspek lingkungan dan ekonomi lebih banyak mendapat perhatian. Sedangkan pada negara berkembang aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan pencapaian pertumbuhan, termasuk aspek kebudayaan, pertimbangan-pertimbangan politik dan sosial sangat memengaruhi pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Dengan membangun industri di suatu wilayah, pasti akan ada berbagai eksternalitas.

Dalam pembangunan ekonomi terdapat dua aktor yang berperan, yakni masyarakat industri dan masyarakat sekitar industri tersebut. dalam suatu masyarakat jelas kegiatan suatu pihak akan berpengaruh pada pihak lainnya. Akan selalu ada dampak positif dan negatif yang akan terjadi pada pihak lain sebagai akibat yang ditimbulkan oleh pihak lain. dalam ilmu ekonomi hal ini disebut *eksternalitas*. Misalnya saja di Indonesia ini. Akibat dari perkembangan industri dan semakin banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri. Maka hal tersebut berpengaruh pada lingkungan sekitar pabrik tersebut. Baik karena limbahnya ataupun karena polusi yang

ditimbulkan. Oleh karena itu di Indonesia diterapkan industri berbasis AMDAL (analisis dampak lingkungan). Jadi setiap industri atau pabrik yang akan dibangun harus memerhatikan dampak lingkungan yang akan.

dihasilkannya. Selain itu pemerintah juga telah memberlakukan kebijakan bagi industri-industri yang menghasilkan limbah atau setidaknya tidak mengolah limbahnya dengan baik sehingga mengganggu masyarakat sekitar industri. Maka industri tersebut akan dikenai sanksi dan di antaranya pencabutan izin usaha dan pencabutan sanksi hukum lainnya. Jadi pembangunan industri di negara-negara maju sebagai representasi dari pembangunan berkelanjutan memberikan dampak positif maupun negatif. Dan dampak-dampak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita semua.

Ekonomi kelembagaan adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada pengaruh biaya transaksi terhadap pembangunan ekonomi. Dalam analisis biaya transaksi tersebut, termasuk di dalamnya adalah analisis tentang kepemilikan dan penguasaan akan sumber daya alam atau faktor produksi, ketidakseimbangan akses, dan penguasaan informasi serta perilaku oportunistik. Sedangkan pembangunan berkelanjutan memiliki dua makna, yakni makna secara luas dan makna secara sempit. Pada intinya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dengan cara memerhatikan lingkungan sekitar dan tidak mengorbankan lingkungan dan mengubah fungsi utama lingkungan itu sendiri. Contoh pembangunan berkelanjutan adalah industrialisasi yang memiliki dampak positif dan negatif.

13.7 LATIHAN

1. Apa yang membedakan antara ekonomi kelembagaan dengan teori neo-classic?
2. Bagaimana contoh pembangunan berkelanjutan di kota?

